

BMKG IMBAU WARGA JATENG SELATAN

# November, Waspada Peningkatan Curah Hujan

**CILACAP (KR)** - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat di wilayah Jawa Tengah (Jateng) bagian Selatan, khususnya Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya untuk waspada peningkatan curah hujan pada November 2024.

"Terkait perkembangan musim hujan, curah hujan pada November diperkirakan tinggi. Secara umum prakiraan curah hujan berkisar 300 milimeter hingga lebih dari 500 milimeter, dengan sifat hujan normal," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi (Stamet) Tunggal Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Kamis (31/10).

Bahkan berdasarkan pengamatan Stamet Tunggal Wulung Cilacap, kata Teguh, curah hujan lebat yang berkisar 50-100 milimeter perhari sudah mulai terjadi di sejumlah wilayah

Jateng bagian Selatan.

Menurut Teguh, hal itu terpantau dari data curah hujan yang terjadi di wilayah Pesisir Cilacap pada Rabu (30/10) malam yang tercatat mencapai 92 milimeter. "Prakiraan cuaca untuk Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya, dalam dua hari ke depan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang kadang disertai petir dan angin kencang," katanya.

Ia mengatakan, potensi cuaca ekstrem itu karena adanya aktivitas gelombang ekuatorial Rossby yang mendukung aktivitas konvektif di wilayah Jateng, kelembapan udara yang cenderung basah, dan labilitas lokal yang kuat.

Dalam perkembangannya ke depan, kata Teguh, curah hujan akan lebih intens terjadi mengingat sudah masuk musim hujan. "Oleh karena itu,

kewaspadaan harus ditingkatkan terutama bagi warga di daerah yang rawan banjir dan longsor," katanya.

Terkait suhu udara yang terasa panas dalam beberapa hari terakhir, Teguh mengatakan, berdasarkan pengamatan di Stamet Tunggal Wulung Cilacap, suhu udara maksimum khususnya di Cilacap pada Rabu (30/10) dan beberapa hari sebelumnya masih dalam kategori normal 32 derajat Celsius. Berdasarkan data klimatologi atau data 30 tahun terakhir, suhu udara maksimum di Cilacap pada Oktober 2016 tercatat pernah mencapai 34 derajat Celsius.

"Pemicu peningkatan suhu tersebut adalah posisi matahari yang sekarang berada di belahan bumi Selatan. Di samping itu minimnya tutupan awan di langit, yang berakibat sinar matahari tanpa penghalang langsung mengenai bumi," kata Teguh. **(Ant/San)-f**

# Mahasiswa UWM Terima Beasiswa Bank BPD DIY



KR-Istimewa

## Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Senopati Gunawan Hasri Baskoro menyerahkan beasiswa kepada Rektor UWM Prof Edy Suandi Hamid.

**YOGYA (KR)** - Sebanyak 20 mahasiswa Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta menerima Beasiswa CSR Bank BPD DIY di Kampus UWM, Banyuwangi, Gamping, Sleman, Kamis (31/10). Beasiswa diserahkan Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Senopati Gunawan Hasri Baskoro kepada Rektor UWM Prof Edy Suandi Hamid.

"Beasiswa ini agar digunakan sesuai peruntukannya, untuk mendorong dan memperlancar kegiatan akademik mahasiswa," kata Rektor UWM.

Edy Suandi menyampaikan apresiasi atas kepedulian Bank

BPD DIY terhadap upaya membantu mencerdaskan anak bangsa yang membutuhkan dukungan beasiswa. Begitu pula dengan kolaborasi berkelanjutan antara UWM dan BPD DIY yang sudah terjalin lama. "Kami berterima kasih atas dukungan Bank BPD DIY terutama di bidang pendidikan. Hubungan UWM dan BPD DIY tidak hanya dalam hubungan kerja sama, tetapi juga hubungan emosional," ungkapnya.

Menurut Edy, Kampus Terpadu akan digunakan sepenuhnya, sementara Kampus 1 akan dikembalikan kepada Kraton Yogyakarta. Hal ini sebagai

bagian dari pengembangan kampus dan komitmen UWM untuk memaksimalkan fasilitas pendukung kegiatan belajar-mengajar bagi mahasiswa.

"Pembangunan kampus yang sedang berjalan sekarang tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, termasuk Bank BPD DIY. Ke depan, kami berharap dukungan Bank BPD DIY untuk pengisian sarana prasarana kampus yang akan selesai dibangun akhir tahun ini," ujarnya didampingi Wakil Rektor Desy Ayu, Retno K Wiranti, dan Rony Luhukay.

Gunawan Hasri Baskoro mengatakan, penyerahan beasiswa ini menegakkan peran BPD DIY dalam mendukung kemajuan pendidikan di Yogyakarta melalui Program CSR yang telah diinisiasi sejak 2018. Ini merupakan bagian komitmen BPD DIY dalam mendukung kampus-kampus di DIY. "Kewajiban bagi kami untuk memberikan dukungan kepada kampus. Kami ucapkan terima kasih kepada UWM karena telah melanjutkan kerja sama dan kontribusi di bidang pendidikan," ungkapnya. **(Ria)-f**

## Pigai

Pigai mengatakan, sudah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.007 yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program-program HAM agar langsung menyentuh masyarakat.

"Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami dan nanti akan lebih mudah, karena kami membentuk kantor wilayah," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajukan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Penambahan tersebut merupakan imbas dari perubahan struktur dan organisasi pemerintahan. Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang, sehingga membutuhkan Rp 1 triliun untuk gaji dan tunjangan.

Pigai menambahkan, untuk program Rp 100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM sudah membutuhkan lebih dari Rp 9 triliun. Belum lagi untuk program-program yang lebih dari 100-200 program yang disiapkan. "Kalau pimpinan DPR berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," ucap Pigai.

Oleh karena itu, menurutnya, usulan penambahan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM adalah hal yang real-

istis.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik. Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya menjadi lebih dari Rp 20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara dan pemenuhan hak masyarakat. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

Pada bagian lain, Natalius Pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa dan negara.

"Kami punya program *emergency condition* (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai.

Sebelumnya, Pigai mengatakan akan fokus pada pematapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berikutnya, Pigai akan melakukan penem-

**Sambungan hal 1**

patan personel di Kementerian HAM.

"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari," jelasnya.

Pigai menceritakan, rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf. "Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," papar Pigai.

Ia juga mengungkapkan, sebelum dirinya berangkat ke Magelang, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 60 kali.

Pihaknya diperkirakan pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11), Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru. Oleh karena itu, Pigai menyatakan, Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat, sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik. **(Ant)-f**

## WACANA REVISI PAKET UU POLITIK

# Dipertimbangkan Metode Omnibus Law

**JAKARTA (KR)** - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempertimbangkan wacana revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. Namun, Tito Karnavian akan melaporkan dahulu usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diindaklanjuti.

Pihaknya, juga masih mengkaji dulu apakah revisi sejumlah UU politik tersebut perlu dipaketkan via Omnibus Law atau sekadar revisi terbatas per UU-nya. "Kemendagri menghargai ide dari teman-teman di DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik," kata Tito kepada wartawan usai Raker bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/10).

Hal yang akan dilakukan, pihaknya selaku Kemendagri memiliki mekanisme sendiri. "Saya harus melapor kepada Bapak Presiden, kemudian saya biasanya melakukan rapat di tingkat antarle-

menterian/lembaga terkait," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode gabungan Omnibus Law. Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doi Kumia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

Doi mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024, perlu dievaluasi karena sejumlah masalah. "Makanya saya tadi mengusulkan, ya sudah kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi Omnibus Law. Karena itu saling terkait semua," kata Doi Kumia.

Rincian delapan UU yang bakal direvisi dengan metode Omnibus Law itu meliputi UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. **(Ant/Obi)-f**

## Idealisme

cerminan peran kaum muda dan idealismenya, dengan mengatakan, "The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion."

Pernyataan ini menegaskan bahwa kaum muda dapat menjadi kekuatan revolusioner dalam menghadapi ketidakadilan. Camus menekankan bahwa untuk membebaskan diri dari belenggu, seseorang harus berani melawan dengan menjadi otentik, suatu bentuk idealisme khas para yang muda.

Demikian juga halnya, dalam konteks historis dan filosofis, gagasan ideal tentang para yang muda di Indonesia berakar pada semangat kolektif Sumpah Pemuda 1928. Pada era perjuangan kemerdekaan, mereka berperan strategis sebagai fondasi moral dan intelektual, mengangkat idealisme sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan.

Para penggagas Sumpah Pemuda adalah pemuda-pemuda Indonesia yang, meski masih sangat muda, memiliki visi kebangsaan yang kuat. Tokoh-tokoh seperti Soegondo Djodjoespito, Mohammad Yamin, Wage Rudolf Supratman, Amir Sjarifuddin, Johan Mohammad Tjokroaminoto, dan Kartosoewirjo, yang rata-rata berusia di awal 20-an, menginisiasi lahirnya gagasan sebuah bangsa. Mereka adalah contoh bahwa meskipun belia, dengan idealisme yang kokoh, para yang muda dapat memainkan peran penting dalam perubahan dan transformasi sosial untuk membentuk bangsa Indonesia.

Demikian pula, dalam perjalanan bangsa ini, para yang muda tetap menjadi tulang punggung perjuangan eksistensi bangsa dengan idealisme mereka. Sutan Sjahrir, sebagai contoh, menunjukkan keberanian luar biasa dalam membela kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Pada usia 36 tahun, sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia, ia

berpidato di Dewan Keamanan PBB pada 14 Agustus 1947, memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia pasca-Proklamasi 1945. Risalah historiografi mengenai peran para yang muda sebagai agen sentral transformasi sosial sebuah bangsa masih bisa terus dipelajari.

**Tulah dan Alineasi Kultural**

Namun, dalam konteks kekinian, idealisme para yang muda, tampak tidak lagi menjadi kebanggaan atau patokan.

Faktanya, ada kecenderungan di kalangan kaum muda yang mencerminkan krisis nilai yang kian mengkhawatirkan, di mana idealisme sebagai generasi penerus bangsa semakin tergerus oleh pragmatisme picik yang memprihatinkan.

Hal ini terlihat dari banyaknya kaum muda yang terjebak dalam pencarian keberhasilan instan, mengabaikan esensi proses dalam kehidupan. Nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan karakter, terancam oleh perilaku yang memprioritaskan hasil tanpa memperhatikan cara. Akibatnya, generasi muda kehilangan kompas moral dan idealisme yang seharusnya memandu mereka menghadapi tantangan zaman.

Fenomena 'fufu fafa' dengan kontroversi moralitasnya menunjukkan bagaimana idealisme para yang muda telah terabaikan dan hampir sepenuhnya dikubur. Ini mencerminkan masalah serius yang terkait dengan hilangnya idealisme di kalangan para yang muda.

Berbagai faktor, mulai dari pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi digital, hingga gaya hidup konsumtif yang dirayakan melalui budaya populer, telah mendorong para yang muda, terjebak pada apa yang diistilahkan Sosiolog Inggris Frank Furedi dalam *Where Have All the Intellectuals Gone?: Confronting 21st Century Philistinism* (2004), budaya

**Sambungan hal 1**

kedangkalan (cult of philistinism) yang memprihatinkan.

Secara filosofis, degradasi moral dan idealitas ini menimbulkan apa yang dalam perspektif Marxian, sebagaimana disatiriskan oleh Erich Fromm dalam *The Sane Society* (1955) diistilahkan sebagai "alienasi kultural," di mana para yang muda kekinian, tampak mengalami keterasingan bahkan keterputusan dari akar sejarah, ideologi, dan nilai-nilai idealismenya.

Kehidupan kontemporer yang serba cepat dan instan, yang menghasilkan prinsip hasil daripada proses, dan akhirnya membuahkan ritus menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan hasil, betapa turut memupuk mentalitas superficial dan pragmatisme sempit dan negatif, menjadikan idealisme tampak seperti konsep yang kuno dan tidak relevan.

Di sinilah terlihat bahwa esensi dari perjuangan para yang muda pada masa lalu dengan segala idealismenya, kini tergantikan oleh semacam fragmentasi sosial di mana para yang muda, cenderung terjebak dalam batas-batas anomali moral sosial yang amat naif dan banal.

Di sini, kritik filosofis terhadap para yang muda menjadi penting, untuk memantik kembali diskusi tentang kemungkinan signifikansinya mengusung jalan 'restorasi' sebagai alternatif solusi. Restorasi ini, di antaranya dengan menghidupkan kembali nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda, tetap sebagai mata air pencerahan mahal bagi landasan ideal eksistensi perjuangan para yang muda.

Dengan demikian dapat diharapkan, para yang muda kekinian, dapat menemukan kembali idealisme sejatinya, sebagai tulang punggung dari perjuangan dalam mewujudkan transformasi perubahan positif bagi masyarakat dan bangsanya. *(Penulis adalah Guru Besar Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta)-d*

## Mantan

dibebani Uang Pengganti Rp 19.755.320.

Kasus ini berawal pada tahun 2012, Pemerintah Kalurahan Candibinangun mendapatkan izin dari Gubernur DIY untuk menyewakan TKD Candibinangun yang terletak di Padukuhan Bulus II Kembangan dan Samberembe seluas 200.225 M2 kepada PT Jogja Eco Wisata (JEW) yang akan dimanfaatkan untuk Tempat Wisata dan Taman Rekreasi Water Park. Terdakwa tidak melakukan review perjanjian sewa yang seharusnya dilakukan pada tahun 2018, terutama mengenai besaran uang sewa yang harus didasarkan penilaian dari

jasa penilai publik/appraisal. Namun terdakwa hanya menentukan kenaikan harga sewa secara lisan tanpa dasar yang jelas dan tentunya nilainya jauh lebih rendah dari yang seharusnya, hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat 3 PerGub No. 34 Tahun 2017.

Bahwa uang sewa yang dibayarkan oleh PT JEW kepada Desa Candibinangun oleh terdakwa tidak dimasukkan dalam APBDesa terlebih dahulu. Namun langsung dibagikan kepada para perangkat desa dan mantan perangkat desa, sehingga merugikan keuangan negara. **(Sni)-d**

## Periksa

Terkait kemungkinan apakah Kejagung akan memeriksa menteri perdagangan lainnya yang menjabat setelah Tom Lembong, Hari mengatakan, saat ini penyidik masih fokus pada penyidikan impor gula pada 2015-2016.

"Tempusnya kan 2015-2016. Penyelesaian tindak pidana manapun itu harus menurut hukum acara yang berlaku. Apa dasarnya? Surat perintah. Surat perintah apa? Surat perintah penyidikan terkait perkara ini. Ya harus fokus di 2015-2016," ujarnya.

Namun demikian, Hari mempersilakan masyarakat untuk melapor apabila menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut. "Kalau ada indikasi, ada pendapat, ada pan-

dangan yang diduga di luar tahun ini (periode 2015--2016), silakan dilaporkan," ucapnya. **(Ant/Has)-f**



Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Petir  
Grafis : Aiko

**Ahmad Sumiyanto, SE MSI**  
Dosen Prodi Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta

INDONESIA baru saja memiliki Presiden baru pengganti Presiden Joko Widodo yaitu Prabowo Subianto. Presiden baru punya pekerjaan rumah menggenjot ekonomi RI hingga ke level 6-7% per tahun. Bila target itu tidak tercapai, maka Indonesia akan terjebak menjadi negara dengan pendapatan menengah. Alih-alih menjadi negara kaya, Indonesia akan menjadi negara dengan mayoritas penduduk yang miskin. Berikut ini merupakan analisis

# Prediksi Nasib Ekonomi RI di Tangan Sang Presiden Baru

7 ekonom mengenai masa depan ekonomi Indonesia di bawah presiden Prabowo Subianto dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh orang nomor 1 di negara ini.

1. Ekonom Senior dan Dosen Universitas Indonesia Chatib Basri Mantan menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Chatib Basri memberikan saran kepada presiden baru Indonesia yang terpilih kelak. Hal ini dipaparkannya dalam wawancara dengan CNN, dikutip Kamis (15/2/2024).

Menurutnya, siapapun presiden yang terpilih, Indonesia butuh akselerasi ekonomi. Ini mutlak harus dilakukan karena Indonesia akan menuju aging population pada 2050.

"Jadi kesempatan untuk Indonesia hanya tinggal 26 tahun lagi dari saat ini, jadi siapapun

presidennya butuh mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari 6% sampai 7%," kata Chatib.

2. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai tugas terberat presiden baru adalah menggenjot ekonomi hingga ke level 6-7%. Hanya dengan cara itu pembangunan akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Dia menyebut kunci untuk mencapai target tersebut adalah dengan membuat Indonesia punya lebih banyak daya saing di berbagai sektor.

3. Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan presiden baru akan menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri. Dari sisi global, kata dia, presiden baru akan langsung dihantam kenyataan

pertumbuhan ekonomi dunia sedang melemah. Hal tersebut tentu akan berpengaruh ke kinerja ekspor-impor dan harga komoditas andalan RI.

4. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai para investor siapa presiden, namun juga siapa pengisi kabinet sang presiden terpilih itu. Menurut dia, hal ini sangat krusial terutama yang mengisi pos-pos menteri bidang ekonomi.

"Proyek hilirisasi belum mendukung keberadaan investor dari negara barat, masih ada kecenderungan investasi didominasi dari Tiongkok," kata dia.

5. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai

pekerjaan besar presiden baru adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Josua mengatakan pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dari perekonomian, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun teknologi produksi sehingga dengan input yang sama, dapat menghasilkan output yang lebih besar.

"Peningkatan produktivitas dapat mendorong naik pertumbuhan ekonomi jangka panjang alamiah Indonesia," kata Josua.

6. Direktur Eksekutif CORE Indonesia M. Faisal Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai tantangan utama presiden baru adalah memastikan Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau

middle income trap. Dia mengatakan cara untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun.

Menurut Faisal, Selain hilirisasi, dia mengatakan presiden juga punya pekerjaan besar yaitu menciptakan lapangan kerja. Dia mengatakan efek pandemi terhadap meningkatnya pengangguran belum berakhir. Pembukaan lapangan kerja ini, kata dia, harus dibarengi dengan peningkatan kualitasnya.

"Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang masif, tapi juga punya kualitas," kata dia.

7. Ekonom LPME FEB UI Teuku Riefky Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPME) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Riefky mengatakan

presiden terpilih akan langsung disambut dengan harga komoditas yang melemah. Permintaan global yang menurun, kata dia, akan berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Bagaimana kemudian pemerintah baru bisa menavigasi tantangan global di jangka pendek ini jadi tantangan utama," kata dia.

Dia menilai dalam 5 tahun presiden baru harus bisa membangun pondasi yang kuat untuk mencapai Indonesia maju. Menurut dia, tanpa pondasi yang kuat itu, maka Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan ketidakpastian global yang mungkin akan berlangsung lebih lama dan silih berganti. (Dari berbagai sumber)